

KINERJA PEMERINTAH KAMPUNG TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN KAMPUNG KALISEMEN DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Eduard L. Pesiwarissa¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Satya Wiyata Mandala

Email :

pesiwarissaeduardlodowyk22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan hubungan antar variabel yaitu Kinerja Pemerintah Kampung (Variabel Bebas X) dan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kampung (Variabel Terikat Y), dengan menggunakan analisis deskriptif sederhana. Subjek penelitian sebanyak 54 orang serta menggunakan teknik penarikan sampel yaitu Proposive Sampling. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan instrumen: Daftar pertanyaan dan pengamatan langsung dilapangan menunjukkan bahwa ; (1) Kinerja Pemerintah Kampung dengan indikator Kemampuan Kerja, Kualitas Kerja dan Tanggung Jawab, berjalan kurang maksimal. Sedangkan (2) Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kampung dengan indikator, Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan, dari ketiga indikator ini, semuanya terdapat kekurangan . Hipotesis dalam penelitian ini adalah Jika Kinerja Pemerintah Kampung Baik Maka Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kampung Kalisemen Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Akan Lebih Meningkatkan.

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah kampung, Efektifitas, Peraturan Kampung, Nabire Barat,

ABSTRACT

This research is to determine and discover the relationship between variables, namely Village Government Performance (Independent Variable X) and Effectiveness of Implementation of Village Regulations (Dependent Variable Y), using simple descriptive analysis. The research subjects were 54 people and used a sampling technique, namely Proposive Sampling. Based on the results of data analysis using instruments: The list of questions and direct observations in the field show that; (1) The performance of the Village Government with indicators of Work Ability, Work Quality and Responsibility is less than optimal. Meanwhile (2) Effectiveness of Implementation of Village Regulations with indicators, Planning, Preparation and Determination, of these three indicators, all of them have deficiencies. The hypothesis in this research is that if the performance of the village government is good, the effectiveness of implementing the regulations in Kalisemen Village, Nabire District, Nabire Regency, Central Papua Province will increase.

Keywords: Performance, Village Government, Effectiveness, Village Regulations, West Nabire,

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kinerja merupakan hal penting bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Prawirosentono dalam Widodo (2001 : 206) bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan menuntut professional dari Aparat pemerintah kampung untuk meningkatkan kinerja terhadap pelayana bagi masyarakat. Aparat pemerintah kampung merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai Abdi masyarakat dan Abdi Negara, sebagai Abdi masyarakat Aparat adalah wakil dari

masyarakat dengan fungsi gandanya tersebut diharapkan Aparat mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya.

Peraturan Kampung merupakan hukum atau aturan yang dibuat oleh Kepala Kampung. Tujuan dibuatnya Peraturan Kampung tidak lain ialah untuk menertibkan masyarakat. Peraturan Kampung merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat desa Kalisemen menaati peraturan Kampung yang telah dibuat, maka diadakanlah penelitian ini. Dari persepsi (tanggapan) masyarakat inilah yang nantinya akan dijadikan bahan untuk memperoleh data. Pembuatan Peraturan Kampung tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah maupun juga Undang-Undang yang telah ada. Tujuannya juga harus jelas dan tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada di kampung tersebut. Dengan adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat inilah mudah-mudahan nantinya akan menjadikan kampung ini lebih teratur dan tertib, Kepala Kampung lebih mempertimbangkan dan lebih memilah dan menimbang peraturan mana yang sesuai untuk kampungnya dikemudian hari. Karena Peraturan Kampung ini tidak lain ialah ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapatkan persetujuan bersama dari Badan Perwakilan Kampung.

Dari pelaksanaan pembuatan Peraturan Kampung yang dilakukan /dibuat oleh kepala Kampung bersama kita akan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap Peraturan Kampung yang telah dibuat dan dilaksanakan di Kampung Kalisemen. Setelah Peraturan Kampung tersebut dibuat dan dijalankan, apakah ada pengaruhnya pada Kampung tersebut baik dalam kinerja Pemerintah Kampung maupun Peraturan Kampung. Menurut Irawan Soehartono (2004 : 6) teori adalah merupakan proposisi yang memberikan penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Landasan teori yang dijadikan sebagai landasan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu analisa yang lebih lanjut terhadap masalah yang dihadapi. Kinerja Pemerintah kampung (Variabel Bebas X)

Pengertian Kinerja

Konsep kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dari sesuatu organisasi. Penilaian kinerja sangat penting dilakukan karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam tujuannya. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006 : 67) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2005 : 15) kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Bastian dalam Hessel Nogi (2005 : 175) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut.

Kemudian kinerja menurut Prawirosentono (1999 : 2) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai baik perseorangan maupun kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan.

Pengertian Kampung

Kemampuan menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengatakan kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Sedangkan kemampuan menurut Gibson (1994 : 104) adalah menunjukkan potensi seorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan itu mungkin dimanfaatkan atau mungkin juga tidak. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin dilakukannya. Kemampuan menurut Siagian (1998 : 15) adalah perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk peningkatan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.

Selanjutnya kemampuan menurut Robbins (1996 : 102) adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya totalitas kemampuan dari seseorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yakni kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan untuk menjalankan kegiatan mental. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan bakat-bakat sejenis. Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.

Pengertian Kualitas Kerja

Kualitas menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003 : 57) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka.

Sedangkan menurut Kotler (2005 : 57) kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Melalui Pengertian dan teori ini dapat diketahui bahwa suatu barang atau jasa akan dinilai bermutu apabila dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai produk yang diberikan kepada konsumen tersebut.

Kualitas menurut Goeth dan Davis dalam Tjiptono (2012 : 51), merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kemudian kualitas menurut Gervin dan Davis dalam M.N. Nasution (2005 : 3) adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses, tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau masyarakat. Kualitas menurut Juran dalam Tjiptono (2003 : 53) adalah suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya. Pengertian kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar.

Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Sedangkan tanggung jawab menurut S. J. Fochema Andrea dalam Nasution (2011 : 48_49) adalah kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi. Tanggung jawab menurut Mustari (2011 : 21) adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam sosial dan budaya), negara dan Tuhan. Kemudian menurut Hawari (2012 : 199) tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari, apakah kita cukup bertanggung jawab untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi toleran dan sadar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan kerja sama. Dari penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan tanggung jawab adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu atau pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela, berani menanggung resiko dan segala sesuatunya baik dari perkataan, perbuatan dan sikap.

Pemerintah Kampung

Pemerintahan kampung merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah kampung kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat Pemerintahan kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kampung adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan kampung. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kampung, ditegaskan bahwa pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat setempat di dalam system kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa pemerintah kampung adalah Kepala kampung atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat kampung sebagai perincian dari pemerintahan kampung.

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Kampung (Variabel Terikat Y)

Pengertian Peraturan Kampung

Sebuah perangkat aturan yang diatur oleh pemerintahan kampung yaitu Kepala kampung dan dirancangan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislative kampung yaitu Badan Permusyawaratan kampung merupakan pengertian dari peraturan kampung. Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan kampung yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintah kampung yang baik, maupun sebaliknya pemerintah yang baik pula didukung demokratis yang baik. Marjoko Hasibuan dalam tulisannya “Pemerintahan kampung yang baik” adalah sekumpulan prinsip maupun gagasan dalam membentuk peraturan hokum ataupun peraturan kampung yaitu : (a). Keabsahan (Legitimasi) Wewenang ataupun kompetensi dan pertanggung jawaban oleh pemerintah. (b). Penghormatan Menjunjung hak asasi manusia terhadap supremasi hokum dan perangkat. ©. Berbagi Hal Berbagai hal yang dimaksud adalah sebuah yang diharapkan oleh masyarakat dalam membuat peraturan kampung yang melayani kepentingan khalayak umum. Dari pengertian aturan kampung dan prinsipnya memberikan gagasan tentang pembentukan peraturan kampung dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya peraturan

kampung yang baik adalah dilihat dari perspektif demokrasi maupun sebaliknya bahwasanya demokrasi yang baik dilihat dari pemerintahan yang baik pula, karena demokrasi suatu keterlibatan masyarakat untuk ikut mengamalkan kebijakan maupun itu ditingkatkan pemerintahan kampung.

Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Para ahli memiliki berbagai pendapat tentang perencanaan. Beberapa di antaranya menekankan pentingnya mengidentifikasi tujuan dan strategi yang tepat, sementara yang lain menekankan pentingnya mengalokasikan sumber daya secara efektif. Ada juga yang menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Erly Suandy berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Douglas mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantulkannya.

Sedangkan Stainer berpendapat bahwa pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru.

Pengertian Penyusunan

Penyusunan adalah kombinasi partisipatif atau usulan dari bawah (bottom up) dengan kebijakan dari atas (top down).

Menurut Ardios (2006:315) mengemukakan bahwa pengertian penyusunan yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :”Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari Penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorang secara baik dan teratur”. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan adalah suatu kegiatan untuk memproses data-data yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan atau perorang secara baik dan teratur.

Pengertian Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.

METODE PENELITIAN

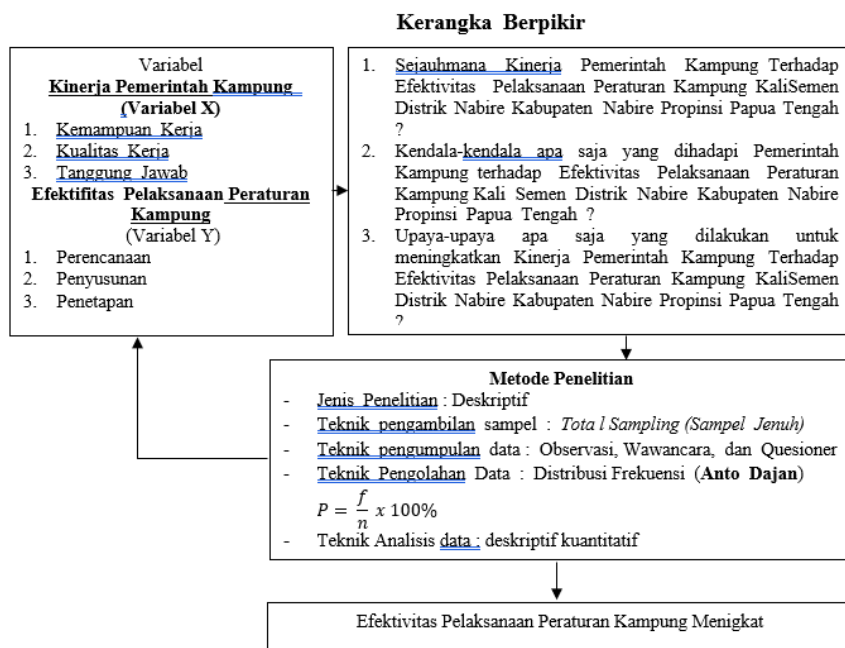
Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dimana Surachmad (1985 : 147) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kantor Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah dengan populasi adalah keseluruhan masyarakat kampung kalisemen yang berjumlah 4.112 jiwa

Pembatasan Masalah

Menurut Wasty Soemanto (1998:12) bahwa pembatasan ruang lingkup penelitian dapat dilakukan untuk menghindari penyimpangan atau perluasan yang tidak perlu, maka setiap penelitian harus dibatasi ruang lingkungnya.

Kerangka Berpikir

Menurut Sugiono (2003:66) kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan, alur pemikiran harus logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis.



Sumber : Alur pikir penulis, 2023

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif yaitu semua data yang berbentuk angka-angka selanjutnya diartikan kedalam bentuk kalimatp, sehingga mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa untuk mendapat jawaban masalah penelitian dan hipotesis penelitian. Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan rumusan **Anto Dajan** (1984 : 34) yaitu :

$$P = \frac{F}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekwensi

n = Responden

100 % = Nilai Konstan

PEMBAHASAN

Dari olah data yang telah diperoleh dengan hasil jawaban responden pada kuesiner, maka akan penulis memberikan penjelasan secara ilmiah dan menganalisis sesuai dengan variabel dan indikator yang terdapat pada penulisan ini.

Kinerja Pemerintah Kampung = Variabel Bebas (X)

Kemampuan Kerja

Tentang pemerintah kampung mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban mampu yaitu sebanyak 22 orang (40.74%). Dari pendapat responden menunjukkan bahwa menurut sebagian masyarakat menjawab pemerintah kampung kadang-kadang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dimana sebagian pemerintah kampung memahami sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan pelayanan, hal ini karena kurang ada petunjuk atau arahan dari atasan dan bagi pihak yang belum memahami pekerjaannya perlu untuk diarahkan sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dan pemerintah kampung sangat penting untuk mengikuti pendidikan, pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan pelayanan.

Kesimpulan penulis adalah semua pemerintah kampung dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Pemerintah kampung mendapatkan penghargaan dari hasil pekerjaan yang dilakukan, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban kadang-kadang yaitu sebanyak 30 orang (55.56%). Dari pendapat responden diatas pemerintah kampung kadang-kadang dapat penghargaan dari hasil pekerjaan, dimana tugas-tugas yang dikerjakan, tidak di terima dengan baik oleh pimpinan dikarenakan tugas yang dikerjakan tidak sesuai dengan aturan atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan penulis adalah pekerjaan yang dibuat perlu untuk disesuaikan dengan aturan atau peraturan organisasi dan pekerjaan juga diperlukan tepat waktu, dengan begitu pemerintah kampung akan mendapat penghargaan dari pimpinan.

Kualitas Kerja

Tentang pemerintah kampung dalam bekerja memiliki kemampuan di bidang tugasnya, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban kurang memiliki sebanyak 31 orang (57.41%). Dari pendapat responden diatas pemerintah kampung kurang memiliki kemampuan di bidang tugasnya, dimana pemerintah kampung melaksanakan pekerjaan masing-masing tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kesimpulan penulis adalah pemerintah kampung perlu miliki kemampuan di bidang tugasnya, agar pelayanan bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah kampung puas terhadap hasil kerja yang dikerjalanny, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban puas sebanyak 27 orang (50.00%). Dari pendapat responden diatas pemerintah kampung puas, dimana sebagai pemrintah kampung melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tentunya setiap perbulan mendapat honor (gaji), sebagai pemerintah mereka puas terhadap hasil dari pekerjaan pelayanan yang dilakukan di kantor kampung dan pekerjaan pelayanan lainnya. Kesimpulan penulis, kalau pemerintah kampung merasaa cukup dengan honor yang diterima dengan begitu akan semangat dalam bekerja atau dapat bekerja dengan sepenuh hati.

Tanggung Jawab

Pemerintah kampung mampu bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan, maka diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban kadang-kadang sebanyak 9 orang (68.52%). Dari pendapat responden diatas kadang-kadang mampu bertanggung jawab, dimana pemerintah kampung terhadap pekerjaannya sering disesuaikan dengan uraian dari tugas masing-masing namun terkadang pekerjaan juga tidak disesuaikan dengan tugas masing-masing, pemerintah kampung tidak selalu bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan untuk dikerjakan dalam pelayanan. Kesimpulan penulis, diharapkan pemerintah kampung supaya selalu mampu bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Pemerintah kampung memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban bertanggung jawab sebanyak 34 orang (62.97 %). Dari pendapat responden diatas dalam bekerja pemerintah kampung memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dipercayakan, dimana membantu masyarakat seperti dengan memberikan bantuan-bantuan berupa barang atau jasa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meringankan beban masyarakat tersebut di kampung. Kesimpulan penulis adalah pemerintah kampung perlu memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan begitu juga dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu bukti pemerintah kampung mengabdikan untuk masyarakat di kampung.

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Kampung = Variabel Terikat (Y)

Perencanaan

Tentang penyusunan perencanaan peraturan Desa yang dibuat oleh pemerintah kampung selalu diterima dengan baik oleh masyarakat, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban kadang-kadang sebanyak 24 orang (44.44 %). Dari pendapat responden diatas dalam penyusunan perencanaan peraturan desa masyarakat tidak semua terima perencanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kampung. Kesimpulan penulis adalah pemerintah kampung sebelum menyusun perencanaan peraturan kampung harus melibatkan masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas peraturan kampung yang telah dibuat.

Perencanaan peraturan kampung dibuat oleh pemerintah kampung masyarakat dapat memahami dengan baik, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban kadang-kadang sebanyak 34 orang (62.97%). Dari pendapat responden diatas perencanaan peraturan kampung yang dibuat oleh pemerintah kampung masyarakat terkadang kurang memahami dengan baik sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kampung terkadang masyarakat tidak patuhi aturan-aturan yang sudah dibuat. Kesimpulan penulis adalah pemerintah kampung harus bisa melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan-masukan dalam membuat peraturan kampung.

Penyusunan

Penyusunan rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah kampung wajib konsultasi dengan masyarakat, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban kadang-kadang sebanyak 42 orang (77.77%). Dari pendapat responden di atas maka pemerintah kampung dalam hal penyusunan rencana kerja pemerintah kampung harus bisa dikonsultasikan dengan masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Kesimpulan penulis adalah penyusunan rencana kerja wajib pemerintah kampung memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terkait agar proses penyusunan rencana kerja berjalan dengan baik.

Pemerintah kampung selalu menyusun peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kampung dan diberitahukan kepada masyarakat, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban kadang-kadang sebanyak 24 orang (44.44 %). Dari pendapat responden di atas pemerintah kampung sebelum menyusun peraturan kampung yang telah dibuat pemerintah kampung harus dikonsultasikan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran agar penyusunan rencana kerja bisa berjalan dengan baik. Kesimpulan penulis adalah pemerintah kampung sebelum menyusun rencana peraturan kampung harus bisa memberikan masyarakat kesempatan agar pemerintah kampung mendapatkan saran dan masukan yang baik di kampung.

Penetapan

Penetapan peraturan kampung yang dibuat selalu diberitahukan kepada masyarakat, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban kadang-kadang sebanyak 39 orang (72.22 %). Dari pendapat responden di atas menunjukkan bahwa penetapan peraturan kampung pemerintah kampung kadang-kadang melibatkan masyarakat dalam hal ini pemerintah kampung harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bias memahami dengan baik apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kampung. Kesimpulan penulis adalah pemerintah kampung kedepannya harus bias membuat penetapan peraturan kampung dengan baik dan diberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat bias lebih memahami apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di kampung.

Pemerintah kampung selalu membuat penetapan peraturan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, maka diketahui bahwa responden memberikan jawaban selalu sebanyak 25 orang (46.30 %) dan kadang-kadang sebanyak 25 orang (46.30 %). Dari pendapat responden di atas menunjukkan bahwa pemerintah kampung sebelum membuat penetapan peraturan di kampung pemerintah kampung memberitahukan kepada masyarakat dan ada masyarakat yang menerima dengan baik ada juga masyarakat yang tidak menerima penetapan-peraturan peraturan kampung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kampung. Kesimpulan penulis adalah pemerintah kampung membuat penetapan peraturan kampung kedepannya harus bisa memberikan masyarakat kesempatan dalam memberikan saran agar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kampung masyarakat bisa menerimanya dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Kemampuan Pemerintah kampung kurang dikarenakan sebagian masyarakat melihat Pemerintah kampung kurang mampu dan Pemerintah kampung kurang mendapat penghargaan dari hasil pekerjaannya yang dibuat dan dalam melaksanakan pekerjaan di kantor kampung maupun di lingkungan kampung kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dalam melayani masyarakat. Pemerintah kampung sering menundah-nunda

pekerjaan pelayanan memberikan bantuan kepada masyarakat di kampung sertad alam melayani masyarakat Pemerintah kampung sering berlaku tidak adil kepada setiap masyarakat, dikarenakan Pemerintah kampung biasa memilih-milih msyarakat, seperti di dalam memberikan bantuan dan lain-lainnya. Dalam membuat perencanaan Peraturan Kampung pemerintah kampung harus bisa melibatkan masyarakat agar masyarakat dapat menerima dan memahami.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Aka Hawari, Guru Yang Berkarakter Kuat, Laksana, Yogyakarta, 2012
- Andrianto, Nico, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E_Government, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Amin Widjaja Tunggal, Dasar_Dasar Customer Relationship Manajenent (CRM), Harvindo, Jakarta, 2008
- AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media, Jakarta, 2011
- Bernardin, H. John dan Joyce, E.A. Russel, Manajemen Sumber daya manusia, Mc. Graw Hill Inc, Singapura, 2003
- Bintoro Tjokromidjojo, Manajemen Pembangunan, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1987
- Dayan, Anto, Pengantar Metode Statistik Deskriptif, LP3ES, Jakarta, 1973
- Gibson, James L, Organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1994
- Gie, The Liang, Ensiklopedia Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1993
- Harbani, Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi, CV. Alfabeta, Bandung, 2013
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Selemba Empat, Jakarta, 2007
- Kotler, Manajemen Pemasaran, Indeks, Jakarta, 2005
- Lovelock, Manajemen Pelayanan, Operasi Sumber Daya Manusia, Prentice Hall, New Jersey, 1992
- Mustari, M, Nilai Karakter, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011
- MN. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Nordiawan, Deddi, Akuntansi Pemerintahan, Selemba Empat, Jakarta, 2008
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003
- Prawirosentono S. D. M, Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Yogyakarta, 1999
- Priyono H, Teori Keadilan John Rawls dalam Tim Redaksi Driyarkara (Ed), Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Robbins, S.P., Perilaku Organisasi, Gramedia, Jakarta, 1996
- Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi, Gramedia, Jakarta, 2003

- Sabarno Hari, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Siagian, Sondang P., Manajemen Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta, 1998
- Soekanto, Soejono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung, 2012
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013
- Surat Keterangan Bupati Nabire Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi
- Soelaiman, Manajemen Kinerja; Langkah Efektif untuk Membangun, Mengendalikan dan Evaluasi Kerja, Intermedia Personalia Utama, Jakarta, 2007
- Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran, Andi, Yogyakarta, 2001
- Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia, Total Quality Management, Andi, Yogyakarta , 2003
- Ukago, Kristinus, Faktor_faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, Bursa Efek, Jakarta, 2005
- Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Widodo, Joko, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Bayumedai Publishing, Jakarta, 2006
- Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali, Jakarta, 2008
- Wungu dan Brotoharjo, Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit Sistem, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003